KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tiket pesawat mahal, mudik terbebani kenaikan harga
Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tiket Pesawat Mahal

Mudik Terbebani Kenaikan Harga

KETUA DPR Puan Maharani menginstruksikan sejumlah komisi di DPR yang terkait dengan persiapan arus mudik Lebaran 2026 untuk segera memanggil kementerian yang menjadi mitra kerjanya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket transportasi menjelang arus mudik Lebaran 2026.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa terbebani kenaikan harga yang tidak terkendali," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Puan menekankan, pengawasan DPR tidak hanya terpaku pada stabilitas harga tiket transportasi, tetapi juga mencakup jaminan keselamatan pemudik serta ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu dilakukan agar setiap potensi kendala dapat diantisipasi lebih awal.

"Negara harus hadir menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat mudik dan saat mereka kembali dari mudik," tegas politikus PDIP ini.

Senada, Ketua Komisi V DPR Lasarus memprotes harga tiket pesawat domestik yang terlalu mahal. Pasalnya, harga tiket perjalanan antar provinsi bisa tembus hingga Rp 15 juta dibanding perjalanan ke luar negeri.

Dia mencontohkan, pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta- Manado tanggal 17 Maret 2026 bisa mencapai Rp 11 juta sekali jalan. Kemudian Jakarta-Jayapura sebesar Rp 15 juta. Sebaliknya rute Jakarta-Kuala Lumpur Rp 8 juta, Jakarta-Bangkok Rp 13 juta dan Jakarta-Singapura Rp 9 juta.

"Memang ada kecenderungan di dalam negeri lebih mahal dibanding terbang keluar, ini agak aneh memang," ucap Lasarus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Lasarus meminta Menteri Perhubungan (Menhub) untuk menjelaskan alasan mahalnya tiket pesawat, khususnya rute domestik. Jika alasan karena bahan bakar, maka Pemerintah perlu melakukan mitigasi.

"Di Indonesia naik pesawat itu masih barang mewah, karena barang mewah maka kena pajak barang mewah. Padahal hari ini semua orang bisa naik pesawat," ujar politikus PDIP ini.

Menurut Lasarus, Pemerintah belum mau menghilangkan pajak barang mewah terhadap tiket pesawat sampai saat ini. Hal itu ditambah dengan harga sparepart yang tinggi dan harga avtur yang mahal karena terkena pajak.

"Jadi saya rasa harus ada rumusnya Pak Menhub untuk dicarikan jalan keluarnya soal tiket ini," harap legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) ini.

Untuk itu, ia meminta persoalan mahalnya tiket pesawat domestik ini harus diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Sehingga keluhan kemahalan tiket ini bisa dihentikan.

Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengaku selalu memonitor penetapan tarif batas atas yang ditetapkan maskapai penerbangan saat libur lebaran 2026 maupun Natal dan Tahun Baru. "Kalau pada saat peak season, airlines biasanya akan menggunakan tarif batas atas sebagaimana yang sudah diberikan," ujar Dudy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026). ■ TIF